



ပီမိကိန္ဒူ ဂျပာပိကျိ တမ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သိကမိ လိလဟူဟေခါ ညါခါ ပီကိလေခါ
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

လမ်းခါ ပုထိယကုဆာဂုဗ်လဲလဲ ဂုဆာသမ် - တမ် (ပဝဏ္ဏဏ)၊ ဂုဟဂုလခါ (ဝဏ္ဏလဲ)၊ ဗုဏ္ဏဏုဇုဇု
 Jalan Patimura Nomor 77 Denpasar – Bali (80234), Telepon (0361) 223562
 Laman : www.diskelkan.baliprov.go.id, Pos-el : dislautkan@baliprov.go.id

Bali, 24 Pebruari 2026

Kepada
 Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali
 2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
 di – Denpasar

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.26.500.5/1358/SEKRET/DISKELKAN

No	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025.	1 (satu) gabung	Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor : B.39.000.8.6.3/2937/RBAK/B.ORG perihal Penyampaian Dokumen LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2025 berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ir. Putu Sumardiana, MP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. [REDACTED]



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



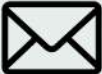


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI**

 dislautkan@baliprov.go.id



 Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk informasi TTE, Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE. Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk verifikasi file.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan memiliki peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup, sebagaimana amanat pemerintah pusat, setiap pembangunan haruslah mengacu pada prinsip Money Follow Function diubah menjadi Money Follow Program serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasi.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh Optimalisasi Produktivitas Perikanan Budidaya, Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), Pemberdayaan masyarakat pesisir, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan, Optimalisasi Produktivitas Perikanan Tangkap, dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat.

Kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi, Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan, Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN), Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap, dan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).



1.2 Struktur Organisasi & Tata Kerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali di bentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Unit Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Kelautan, membawahi:
 - a. Unit Substansi Tata Ruang Laut;
 - b. Unit Substansi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - c. Unit Substansi Pengendalian Ruang Laut.
- 4) Bidang Perikanan, membawahi:
 - a. Unit Substansi Perikanan Tangkap;
 - b. Unit Substansi Perikanan Budidaya; dan
 - c. Unit Substansi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
- 5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
 - a. Unit Substansi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. Unit Substansi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - c. Unit Substansi Usaha dan Investasi.
- 6) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - a. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
 - b. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan; dan
 - c. Unit Substansi Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 7) Jabatan Fungsional; dan
- 8) UPTD
 - a. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD PPMHP merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Susunan organisasi UPTD PPMHP terdiri dari : Kepala UPTD, membawahi :



- i. Sub Bagian Tata Usaha;
 - ii. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - iii. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut merupakan unsur pelaksana kegiatan pembenihan berdasarkan program Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Susunan organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut terdiri dari : Kepala UPTD, membawahi :
- i. Sub Bagian Tata Usaha;
 - ii. Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut;
 - iii. Seksi Produksi Budidaya Air Tawar; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Bali. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Bali dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali merupakan unsur pelaksana teknis berdasarkan program Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Susunan organisasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali terdiri dari : Kepala UPTD, membawahi :
- i. Sub Bagian Tata Usaha;
 - ii. Seksi Pengelolaan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
 - iii. Seksi Pengawasan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan; dan
 - iv. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD Pelabuhan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis program Dinas kelautan dan Perikanan



Provinsi Bali. Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri dari : Kepala UPTD, membawahi :

- i. Sub Bagian Tata Usaha;
- ii. Seksi Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran;
- iii. Seksi Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha; dan
- iv. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam tahun 2023 termasuk pegawai UPTD sebanyak 179 orang terdiri dari:

1) Jumlah Pegawai

Jenis Pegawai	Jumlah (Orang)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	94
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	44
Tenaga Kontrak	38

2) Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Setrata 2 (S2)	28
2	Setrata 1 (S1), (D/IV)	85
3	Sarjana Muda (D/I), (D/II),(D/III),	12
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	46
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah (SLTP)	1
6	Sekolah Dasar (SD)	4
Jumlah		176

3) Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Golongan

No.	Pangkat	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	19
2	Golongan III	65
3	Golongan II	10



4	Golongan I	0
5	Golongan XI (PPPK)	1
6	Golongan IX (PPPK)	28
7	Golongan VII (PPPK)	8
8	Golongan V (PPPK)	5
9	Golongan I (PPPK)	2
	Jumlah	138

1.4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Secara geografis letak Provinsi Bali berada pada bagian tengah kepulauan Indonesia sangat strategis yang diapit oleh 2 (dua) benua yaitu benua Asia dan Australia dan 2 (dua) samudra, Hindia dan Pasifik yang menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam baik sumber daya hayati maupun non hayati seperti sumber daya ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, mineral, minyak bumi dan sumber energi lainnya. Secara umum sumber daya kelautan dan perikanan dapat dibagi atas 4 (empat) kelompok yaitu : (1) Sumber daya dapat pulih (Renewable resources), (2) Sumber daya tidak dapat pulih (Non renewable resources), (3) Energi kelautan, (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan (Environmental services). Sumber daya dapat pulih meliputi : berbagai jenis ikan, udang, kekerangan, kepiting, rumput laut dan biota lainnya, sedangkan sumber daya tidak dapat pulih di antaranya mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas, sumber daya energi kelautan terdiri dari : OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), pasang surut, arus, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Provinsi Bali selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan adalah:

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Ekosistem & Konservasi Untuk Keberlanjutan Masih Lemah;
- 2) Produktivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Masih Rendah;
- 3) Aktualisasi Tradisi/Budaya Bahari Dan Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal Bali Semakin Luntur
- 4) Eksplorasi Dan Pemanfaatan/Pengusahaan Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belum Optimal;



- 5) Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Belum Didukung Oleh Tata Kelola Yang Baik, Terutama Kebijakan Dan Regulasi;
- 6) Perlindungan Terhadap Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan-kecil Dan Pengrajin Garam Belum Optimal;
- 7) Penerapan Teknologi Dan Modernisasi Perikanan Belum Optimal;
- 8) Kapasitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah;
- 9) Hilirisasi Produk Perikanan, Jaringan Dan Outlet Pemasaran Belum Berkembang Optimal Sehingga Daya Saing Produk Dan Nilai Tambah Masih Rendah;
- 10) Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Kelautan Dan Perikanan Belum Optimal;
- 11) Akses Masyarakat Terhadap Pembiayaan Dan Permodalan Usaha Masih Rendah;
- 12) Pelaku Utama Kelautan Dan Perikanan Cenderung Menurun Seiring Dengan Kemajuan Pariwisata;
- 13) Tingkat Kegemaran Konsumsi Ikan Masih Rendah;
- 14) Pembangunan Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Berbasis Kawasan Dari Hulu Sampai Hilir Belum Berkembang Secara Optimal;
- 15) Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Bagi Pelaku Utama, Literasi, Kewirausahaan Dan Kelembagaan Usaha Terhadap Bisnis Kelautan Dan Perikanan Masih Lemah;
- 16) Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan Masih Rendah.

Adapun isu-isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Belum optimalnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang PDRB;
- 3) Belum optimalnya tingkat konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan;
- 4) Belum terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 5) Belum optimalnya kesejahteraan nelayan;

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali didasari oleh beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871)



- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 9) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80);
- 10) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
- 11) Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Kelautan mengemban Tujuan ke-1 Pemerintah Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yaitu: “Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali”. Kemudian pada sasaran Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 di jadikan tujuan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai berikut:

Sasaran Pemerintah Daerah/Tujuan Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya perekonomian Krama Bali;
Sasaran Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB;
	2.	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Sasaran Pemerintah Daerah/Tujuan Perangkat Daerah	2.	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok;
Sasaran Perangkat	1.	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan



Daerah	2.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
--------	----	--

Selanjutnya secara detail Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja dan Target tahunan di tampilkan pada tabel berikut:



TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					KONDISI AKHIR PERIODE PERENCANAAN	FORMULASI
					KONDISI AWAL RENSTR A TAHUN 2023	2024	2025	2026			
1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,47	5,75 (5,25-6,25)	5,75 (5,25-6,25)	5,85 (5,35-6,35)	5,85 (5,35-6,35)	PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS	
		Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB *	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	5,10%	5,79%	6,02%	6,25%	6,25%	Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	
		Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	6%	6%	6%	6%	18%	= (Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%	
2	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok		Angka inflasi	Persen	3±1	3±1	3±1	3±1	3±2	Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga; sumber data: BPS	
		Meningkatnya kesejahteraan Nelayan *	Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,45%	100,22 %	100,25 %	100,28 %	100,28%	Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	



	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen	2%	2%	2%	2%	6%	$X_{kp} = (X1 + X2 + X3 + X4) / 4$ X1 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut X2 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap X3 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya X4 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
--	---	--	--------	----	----	----	----	----	---



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja, menciptakan tolak ukur kinerja, memfasilitasi manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Maka Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun Perjanjian kinerja yang merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah. Perjanjian ini berisi program, kegiatan, dan indikator kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Gubernur Bali:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Manakjemen Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai
2	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	6,02 %
3	Mengoptimalkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6 %
4	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,25 %
5	Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha	2 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 33.523.890.869,00	PAD
2	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 154.596.492,00	PAD, DAK
3	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 472.272.902,00	PAD
4	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 1.023.918.104,00	PAD, DAK
5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 181.509.884,00	PAD, DAK
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 818.720.302,00	PAD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dimaksud untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin baik.

Tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali jika dibandingkan antara capaian pada tahun 2024 dengan capaian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Manajemen Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	81	100 %	82 Nilai	81 Nilai	98,78 %
2	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	5,79%	4,41 %	76,17 %	6,02 %	4,27 %	70,93 %
3	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6%	4%	66,67 %	6 %	32,31 %	538,5 %
4	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,22%	91,97%	90,00%	100,25 %	96,72 %	96,48
5	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	2%	4,2%	210%	2 %	6,7 %	335 %

Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali. Dengan berakhirnya periode kepemimpinan Gubernur tahun 2018-2023 maka pada tahun 2025 sasara mengacu pada RPD tahun 2024-2026 dimana terdapat 5 Sasaran seperti pada tabel di atas yang diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Terdapat dua indikator yang capaian realisasinya melampaui 100%, sedangkan tiga indikator lainnya belum mencapai 100%. Capaian realisasi Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja sebesar 98,78 %, merupakan Nilai Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah oleh Inspektorat . Capaian realisasi kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB sebesar 70,93 %. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu. PDRB merupakan indikator utama dalam pembangunan daerah. Manfaat PDRB salah satunya digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor perikanan sangat perlu ditingkatkan dari segi jumlah produksi maupun harga agar dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB lebih maksimal lagi. Capaian realisasi Nilai Tukar Nelayan sebesar 96,48 % dimana seharusnya NTN adalah >100% yang artinya perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan lebih kecil daripada indeks harga yang dibayar nelayan sehingga nelayan harus menggunakan sumberdaya dari bidang usaha lain untuk meningkatkan pendapatan.

Untuk mengamati capaian selama 5 tahun kebelakang dari sasaran di atas dapat diamati pada tabel berikut:

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Manajemen Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	N/A	N/A	N/A	81 Nilai	82 Nilai	N/A	N/A	N/A	81 Nilai	81 Nilai
Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	N/A	N/A	N/A	5,79%	6,02 %	N/A	N/A	N/A	4,41 %	4,27 %
Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	N/A	N/A	N/A	6%	6 %	N/A	N/A	N/A	4%	32,31 %
Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	N/A	N/A	N/A	100,22 %	100,25 %	N/A	N/A	N/A	91,97 %	96,72 %
Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	N/A	N/A	N/A	2%	2 %	N/A	N/A	N/A	4,2%	6,7 %



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator kinerja dapat diamati pada tabel berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	6,02%	4,27 %	70,93 %	Pencapaian realisasi belum mencapai target	Upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan produksi seperti melakukan peningkatan jumlah benih ikan yang dihasilkan,, meningkatkan tingkat konsumsi ikan, Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dari Hulu ke Hilir.
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6%	32,31%	538,5 %	Pencapaian realisasi telah melampaui target	Setelah ditetapkannya KKPRL, Pelaku usaha yang berusaha di Kawasan tersebut telah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Sehingga para pelaku usaha dapat mengurus perizinan terkait KKPRL.
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,25 %	96,72%	96,48%	Pencapaian realisasi belum mencapai target	Upaya yang dilaksanakan adalah memberikan bantuan sarana penangkapan ikan untuk peningkatan produksi nelayan
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	2%	6,7%	335%	Pencapaian realisasi telah melampaui target	Sudah dilaksanakan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan

Dari tabel di atas dapat kita amati bahwa Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis di atas terukur dan dapat dicapai meskipun tidak semua realisasinya mencapai 100%. Permasalahan yang terjadi juga dapat ditangani sepertipada solusi yang dijelaskan pada tabel di atas. Sedangkan untuk mengetahui berapa besaran anggaran yang digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut dapat diamati pada Tabel berikut:



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian%	
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	6,02 %	4,27 %	70,93 %	1.836.962.573	1.710.188.676	93,10	6,90
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	6 %	32,31 %	538,5 %	288.231.492	264.428.988	91,74	8,26
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	100,25 %	96,72 %	96,48 %	456.739.000	453.114.191	99,21	0,79
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	2 %	6,7 %	335 %	150.791.884	147.381.734	97,74	2,26

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut dengan jumlah dana yang dianggarkan cukup besar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali juga dapat menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dengan baik sehingga dapat mencapai realisasi anggaran rata-rata diatas 90 %. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja tersebut dapat diamati pada tabel berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	70,93%	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0,34 %	Menunjang
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32.896,8 ton	Menunjang
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	Menunjang
				Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	12 Dokumen	Menunjang



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Daerah Kabupaten/Kota	Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	2.584.8 54 ekor	Menunjang
				Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 unit	Menunjang
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2,02 %	Menunjang
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	30 Unit Usaha	Menunjang
					Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	5.355 Rekom endasi	Menunjang
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan	Kegiatan yang diberikan kepada unit	30 Kegiat an	Menunjang



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		
					Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan	195 Kegiatan	Menunjang



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		
				Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	7 unit usaha	Menunjang
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	538,5 %	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	45,76 %	Menunjang
					Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	68,51 %	Menunjang



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46.937,59 Ha	Menunjang
					Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	5 Kawasan	Menunjang
				Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung ekonomi biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam	12 Pelaku Usaha	Menunjang
				Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	1 Dokumen	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	5 kelompok	Menunjang
				Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	Menunjang
				Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	46.937,59 Ha	Menunjang
3	Meningkatnya kesejahteraan	Nilai Tukar Nelayan	96,48 %	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	-0,12 %	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
	raan Nelayan			Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	112.363,74 ton	Menunjang
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2 Unit	Menunjang
				Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,4 %	Menunjang
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	37 rekomendasi	Menunjang
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	4.856,5 ton	Menunjang
				Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	Menunjang
4	Terwujudnya keadulatan dalam pengelolaan	Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	6,7 %	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap	5,99 %	Menunjang



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	sumber daya kelautan dan perikanan				Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku		
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	44 pelaku usaha	Menunjang
				Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	41 Pelaku Usaha	Menunjang
				Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas POKMASWAS yang Terdaftar dan Aktif	33 Kelompok	Menunjang

Terdapat 5 (lima) Program yang menunjang Capaian Kinerja tersebut. Pada Indikator Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB yang di hasilkan terdapat 2 (dua) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pada Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Ruang Laut terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap serta Pada Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Selain ketiga program di atas, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diamati pada tabel berikut:



No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.018.000,00	32.897.104,00	91,34 %
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.018.000,00	32.897.104,00	91,34 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.702.348.375,00	21.615.976.609,00	84,10 %
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.702.348.375,00	21.615.976.609,00	84,10 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.038.933.300,00	948.920.096,00	91,34 %
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.459.500,00	4.871.790,00	65,31 %
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	728.957.900,00	707.600.000,00	97,07 %
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.642.400,00	148.340.993,00	78,22 %
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.923.500,00	10.445.211,00	55,20 %
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.950.000,00	77.662.102,00	82,66 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.565.620,00	263.730.000,00	98,57 %
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	267.565.620,00	263.730.000,00	98,57 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.661.000,00	135.675.418,00	83,93 %
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.611.000,00	2.300.000,00	63,69 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.050.000,00	133.375.418,00	84,39 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.778.010.280,00	3.599.945.866,00	95,29 %
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.738.415.344,00	2.608.035.180,00	95,24 %
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.230.000,00	58.947.050,00	78,36 %



No	Program	Kegiatan/Sub Keegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	964.364.936,00	932.963.636,00	96,74 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	187.475.000,00	171.378.496,00	91,41 %
		Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung ekonomi biru	17.475.000,00	9.475.450,00	54,22 %
		Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	170.000.000,00	161.903.046,00	95,24 %
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	55.796.492,00	54.356.492,00	97,42 %
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	55.796.492,00	54.356.492,00	97,42 %
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	416.024.197,00	415.724.197,00	99,93 %
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	416.024.197,00	415.724.197,00	99,93 %
		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	16.861.500,00	16.699.050,00	99,04 %
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	16.861.500,00	16.699.050,00	99,04 %
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	175.820.000,00	170.721.000,00	97,10 %
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	159.720.000,00	155.035.000,00	97,07 %
		Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16.100.000,00	15.686.000,00	97,43 %



No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	150.791.884,00	147.381.734,00	97,74 %
		Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	20.708.900,00	17.298.750,00	83,53 %
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	130.082.984,00	130.082.984,00	100,00 %
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	329.160.979,00	316.617.742,00	96,19 %
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	329.160.979,00	316.617.742,00	96,19 %
UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA					
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.277.200,00	41.914.560,00	90,57
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.664.000,00	4.400.000,00	94,34
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.117.200,00	5.970.500,00	83,89
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	30.306.540,00	93,25
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.996.000,00	1.237.520,00	62,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.554.200,00	34.500.000,00	89,48
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.554.200,00	34.500.000,00	89,48
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.070.200,00	89.531.002,00	69,37



No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	471.000,00	300.000,00	63,69
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.599.200,00	89.231.002,00	69,39
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.844.460,00	415.498.778,00	96,21
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.497.984,00	155.300.684,00	93,27
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	265.346.476,00	260.198.094,00	98,06
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	792.315.194,00	768.778.194,00	97,03
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	792.315.194,00	768.778.194,00	97,03
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.933.000,00	37.231.180,00	88,79
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.433.000,00	5.810.000,00	68,90
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	30.721.180,00	94,53
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	700.000,00	70,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.072.080,00	36.800.000,00	99,27
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.072.080,00	36.800.000,00	99,27
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.020.500,00	84.811.868,00	71,86
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.500,00	650.000,00	63,69



No	Program	Kegiatan/Sub Keegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.000.000,00	84.161.868,00	71,93
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.913.778,00	398.646.954,00	94,04
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.232.000,00	69.730.500,00	75,60
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	316.901.778,00	315.076.654,00	99,42
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.780.000,00	13.839.800,00	93,64
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	536.666.400,00	454.071.740,00	84,61
		Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	46.041.000,00	35.748.500,00	77,64
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	490.625.400,00	418.323.240,00	85,26
UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.957.100,00	59.699.921,00	85,34
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.286.000,00	7.412.021,00	89,45



No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.500.000,00	36.435.225,00	87,80
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.366.900,00	3.227.880,00	73,92
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.804.200,00	12.624.795,00	79,88
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	767.553.052,00	668.706.968,00	87,12
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.600.000,00	95.108.545,00	71,19
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	633.953.052,00	573.598.423,00	90,48
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.096.600,00	2.982.840,00	17,45
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	596.600,00	380.000,00	63,69
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.500.000,00	2.602.840,00	15,77
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	44.960.000,00	38.694.000,00	86,06
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	44.960.000,00	38.694.000,00	86,06
UPTD PELABUHAN PERIKANAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.085.900,00	62.465.573,00	88,06
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.835.900,00	20.098.321,00	82,10
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	30.103.252,00	74,89



No	Program	Kegiatan/Sub Keegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.750.000,00	12.264.000,00	92,63
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.445.200,00	18.750.000,00	73,22
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.445.200,00	18.750.000,00	91,71
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000,00	5.211.968,00	91,71
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	5.211.968,00	43,43
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.923.625,00	142.052.705,00	43,43
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.800.000,00	124.775.000,00	94,12
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.123.625,00	17.277.705,00	97,63
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	23.854.000,00	20.690.944,00	86,74
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	23.854.000,00	20.690.944,00	86,74
Total			36.095.009.116,20	31.271.062.999,00	86,64 %

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang dilakukan efisiensi dan terdapat satu sub kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikarenakan tidak adanya penyedia untuk kegiatan tersebut. Kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Penyusunan Dokumen Kadaster karena tidak ada penyedia yang memenuhi syarat dan kualifikasi



1.2. Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada Tahun 2025 berikut adalah jumlah anggaran dan realisasi anggaran:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	4	5	6
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	33.365.283.470,20	28.694.349.410	86,00
2	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	288.231.492	264.428.988	91,74
3	Pengelolaan Perikanan Tangkap	456.739.697	453.114.191	99,21
4	Pengelolaan Perikanan Budidaya	968.135.194	939.499.194	97,04
5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	150.791.884	147.381.734	97,74
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	865.827.379	770.689.482	89,01
Total		36.095.009.116,20	31.271.062.999	86,63

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung Program Dinas Kelautan dan Perikanan memprioritaskan anggaran untuk program prioritas sesuai dengan program yang menunjang Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Bali. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali juga dapat menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dengan baik sehingga dapat mencapai realisasi anggaran 86,63%.




BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025 tercermin melalui pencapaian sasaran strategis organisasi yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berjumlah lima indikator. Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan segala upaya yang telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali telah EFEKTIF dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada aspek akuntabilitas keuangan, penyerapan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mencapai 89.88% dengan realisasi fisik mencapai 99.52%. Tidak terserapnya anggaran yang sebesar 10.12% tersebut merupakan hasil EFISIENSI anggaran mengingat seluruh kinerja impact dan outcome telah tercapai dan hampir seluruh kinerja output telah tercapai.

Dalam pencapaian target kinerja organisasi tahun 2025 muncul beberapa permasalahan/hambatan. Meskipun begitu beberapa permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif masih tetap diperlukan atas segala kemungkinan masalah/hambatan yang mungkin timbul dimasa mendatang, sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Beberapa langkah antisipatif dan koreksi dapat ditempuh untuk akselerasi capaian kinerja organisasi dimasa datang khususnya terkait pemenuhan kebutuhan pegawai dan pelaksanaan diklat yang berkelanjutan agar bisa terus update atas regulasi terkait kelautan dan perikanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 telah kami susun untuk dapat perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih.

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS Ir. Putu Sumardiana, MP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. [REDACTED]</p>
---	---

